

PENGEMBANGAN WILAYAH *HINTERLAND* DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Wilayah Buring Kota Malang)

Risna Febriyani, Heru Ribawanto, Wima Yudo Prasetyo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: ladyrisna@yahoo.co.id

Abstract: *Hinterland Regional Development in Sub Kedungkandang for Improving Public Service (Studies in Regional Buring-Malang).* This research was conducted on the basis of the presence of development in the city of Malang are not evenly distributed. The implications of these inequalities is that there are areas of low public infrastructure development, namely Buring region. Attempts to overcome these problems is development area. As development efforts, the need for planning, which is the first step of the development of the region. In planning we can see how the circumstances and character of the area. In addition we will be able to figure out what the appropriate public services to be developed in Buring as its hinterland. After the regional planning process is done, then the next step is to outline the government's efforts in developing regions. These efforts come after the government know beforehand Buring region. This was done so that the development of infrastructure and public services on target in accordance with the social conditions of the local community. Malang Government efforts include several development strategies undertaken.

Keywords: *development area, hinterland, improving public services*

Abstrak: *Pengembangan Wilayah Hinterland di Kecamatan Kedungkandang sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Wilayah Buring-Kota Malang).* Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya pembangunan di wilayah Kota Malang yang belum merata. Implikasi dari ketidakmerataan tersebut adalah terdapat wilayah yang pembangunan infrastrukturnya rendah, yaitu wilayah Buring. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya pengembangan wilayah. Sebagai upaya pengembangan, maka dibutuhkannya perencanaan, yang mana merupakan langkah awal dari pengembangan wilayah. Dalam perencanaan kita dapat melihat bagaimana keadaan dan karakter wilayah. Selain itu kita nantinya dapat mengetahui layanan publik apa yang cocok untuk dikembangkan di Buring sebagai wilayah *hinterland*. Setelah proses perencanaan wilayah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah memaparkan upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Upaya ini didapat setelah pemerintah mengenal wilayah Buring terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar pengembangan infrastruktur pelayanan publik tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Kata Kunci: *pengembangan wilayah, hinterland, peningkatan pelayanan publik*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar dan kaya, yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang masing-masing memiliki potensi dan fungsi yang luar biasa. Karena begitu banyaknya potensi yang dimiliki maka pemerintah disiapkan untuk mengembangkan dan menata daerah itu. Tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya masih belum merata. Implikasi dari ketidakmerataan tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan publik terutama pada wilayah *hinterland*, yaitu wilayah Buring. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya pembangunan daerah. Berbicara mengenai pembangunan daerah maka secara

khusus lagi ada pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan bentuk dari pembangunan daerah dan juga merupakan salah satu wujud tugas pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum agar berdaya.

Menurut Dewantoro (2001, h.188) masalah pelayanan masyarakat sangat erat kaitannya dengan eksistensi Pemerintah Daerah (Pemda), karena kapabilitas Pemda akan diukur dari segi kemampuannya memberikan pelayanan yang berkualitas dalam batas-batas *resource* yang tersedia". Di bagian wilayah Malang Tenggara dan Malang Timur, pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Malang berupaya melakukan pengembangan

wilayah. Menurut Wiroatmodjo (2001, h.2) “Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom”.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Malang Tenggara dan Malang Timur, yaitu pada koridor Jalan Mayjend Sungkono, karena saat ini wilayah di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang untuk dikembangkan. Adapun pengkhususan pelayanan publik yang diambil adalah jenis pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang 2009-2029.

Hal yang sudah diketahui bahwa pembangunan di Kota Malang sudah *over development*, sehingga sudah seharusnya arah pembangunan bergeser ke wilayah lain, yaitu wilayah Malang Timur, khususnya Buring. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengurangi kesenjangan antar daerah diperlukan peningkatan efektivitas program-program pengembangan daerah yang didasarkan atas kesesuaian tipologi dengan karakteristik wilayah yang akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Penulis memfokuskan pengembangan wilayah *hinterland* tepatnya pada wilayah sepanjang koridor Jalan Mayjend Sungkono, guna mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan pembangunan wilayah Kota Malang, dan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat komprehensif dan holistik.

Tinjauan Pustaka

1. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

Pengembangan wilayah tentunya sudah dilakukan sejak pemerintahan yang lalu, salah satunya adalah pada era orde baru dengan dibentuknya PELITA I dan II yang dalam mengembangkan wilayah masih berorientasi pada pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, menurut Marbun (1979, h.116) “Pada PELITA II s/d IV landasan pemikiran pengembangan wilayah ialah pola aliran barang dan jasa, yaitu merupakan tiruan atau pola berpikir pada zaman penjajahan yang memberi fungsi utama kota sebagai Terminal Jasa Distribusi (TJD) atau Pusat Logistik”.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan atau aspek fungsional. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Menurut Sulitino (2010, h.14) “Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Pengertian pengembangan wilayah menurut Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil (2003, h.2) dapat dijabarkan sebagai berikut: “Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian wilayah, keterpaduan sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI”.

2. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Strategi dalam melakukan perencanaan daerah terdiri dari beberapa tahap, tahap pertama untuk melakukan pembangunan daerah dibutuhkannya pengenalan wilayah perencanaan, setelah mengenali wilayah yang akan dibangun maka tahap kedua adalah menganalisis situasi wilayah, dan tahap berikutnya adalah tahap zonasi lahan. Dalam pengenalan wilayah terdiri dari beberapa cara, yaitu: Pemahaman Wilayah Secara Cepat (*Rapid District Appraisal/ RDA*), Identifikasi Kebijakan Pembangunan, Profil Wilayah dan Sumber-Kuangan.

Setelah mengenali wilayah pembangunan, maka strategi kedua adalah dengan menganalisis situasi. Dengan adanya analisis situasi wilayah perencanaan diharapkan mampu menganalisis masalah dan potensi yang nantinya akan tergambarkan dalam “*frame condition*” (gambaran mengenai kondisi wilayah). Menurut Riyadi (2003, h.36) strategi terakhir dalam perencanaan wilayah adalah tahap zonasi lahan yang dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang penggunaan utama lahannya yang diperbolehkan adalah penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan untuk mendukung maksud-maksud penggunaannya secara berkelanjutan dan sejalan dengan praktek pengelolaan lahan yang benar serta sesuai dengan rumusan kebijakan penggunaannya, untuk memenuhi pembangunan dan pelestariannya.

Dalam strategi pengembangan wilayah terdapat beberapa strategi. Pertama strategi Paradigma Teknis- Kemasyarakatan (*Community Technical Paradigm*). Kedua adalah strategi

pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini dikembangkan melalui kajian Geografi, pendekatan ini tergabung dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan spasial (*spatial approach*) dan pendekatan ekologis (*ecology approach*). Pendekatan spasial adalah suatu pendekatan yang menerangkan mengenai fenomena geosfer melalui ruang sebagai media untuk dianalisis.

Ketiga adalah strategi sinergisme spasial. Ide dalam konsep ini adalah melihat potensi yang di miliki oleh suatu wilayah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kemudahan fasilitas bagi masyarakat. Keempat adalah strategi sinergisme fungsional. Seperti halnya dengan sinergisme spasial, sinergisme fungsional mempunyai tujuan yang optimal dalam mengembangkan wilayah apabila bekerjasama dengan wilayah lain, dibandingkan dengan mengolah sendiri potensi wilayahnya. Berikut akan dipaparkan perbedaan antara sinergisme spasial dan fungsional menurut Yunus (2005, h.222): “Kalau dalam sinergisme spasial penekanan penggabungan adalah ruang/wilayah/ daerah, maka dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya”.

1. Pelayanan Publik

Arti pelayanan publik secara konseptual menurut Kotler dalam Lukman (2000, h.8) adalah pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Kurniawan (2005, h.4) pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wilayah *Hinterland*

Wilayah *hinterland* biasanya disebut dengan istilah lain, yaitu: kota satelit. Pada dasarnya dari kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu kota kecil yang berada disekitar kota besar, yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di wilayah *hinterland* tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota.

Secara ekonomi wilayah *hinterland* bisa menjalankan perekonomian secara mandiri, walaupun ada beberapa barang dan jasa yang dalam pendistribusiannya masih tergantung pada kota besar, tetapi secara garis besar kawaasan *hinterland* atau kota satelit dapat memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya atau penduduk sub-urban. Dengan kata lain, menurut Yunus (2005, h.285) dapat diungkapkan bahwa wilayah *hinterland* juga berfungsi sebagai penerima tenaga kerja karena didalamnya telah berkembang fungsi-fungsi sosio ekonomi kekotaan, namun juga berperan sebagai pemasok komoditas ketempat lain.

3. Hubungan Pengembangan Wilayah dengan Pelayanan Publik

Dari uraian diatas, kita mengetahui peran penting dari suatu kota, salah satunya menyediakan pelayanan publik. Walaupun kota memiliki peran untuk menyediakan industri manufaktur, tetapi hal tersebut juga tidak terlepas dari elemen pelayanan publik. Jika kita melihat pelayanan publik dalam suatu wilayah, maka mencakup sarana prasarana pada daerah perkotaan. Sudah kita ketahui bahwa daya tarik dari suatu kota sangatlah tinggi karena di dalamnya menyediakan kesempatan kerja yang luas, pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan, dan menyajikan kemudahan aktifitas yang beragam. Untuk itu dalam buku Adisasmita (2005, h.110) menyatakan sebagai berikut:” Prasarana perkotaan meliputi jalan/jembatan, air bersih, persampahan, sanitasi, ruang parkir, taman kota, dan sebagainya. Yang termasuk sarana perkotaan adalah terminal, pasar, pemadam kebakaran dan sebagainya. Sedangkan fasilitas pelayanan ekonomi terdiri dari bank, pasar, hotel, restoran, dan sebagainya. Dan fasilitas pelayanan sosial misalnya meliputi perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, olah raga, rekreasi, dan sebagainya.

Tujuan dan sasaran pemerintah dalam melakukan campur tangan pengelolaan kota dan pengembangan wilayah menurut Sadyohutomo (2008, h.18) adalah sebagai berikut:

1. Penyedia barang publik dan pelayanan publik;
2. Perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik;
3. Sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah (khususnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik);
4. Kelestarian lingkungan;
5. Menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Dari peran dan tujuan di atas, faktor pelayanan publik selalu termuat, dan hal itu berarti antara keduanya tidak dapat dipisahkan, atau bisa disimpulkan adanya keterkaitan hubungan antara pelayanan publik dengan manajemen wilayah dan kota. Faktor pelayanan umum, yang merupakan faktor kunci dari berkembangnya suatu wilayah. Karena dengan makin banyaknya pelayanan umum di suatu kota dan wilayah maka akan tingginya daya tarik penduduk terhadap kota dan wilayah itu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan penelitian tentang pengembangan wilayah Buring, maka penelitian memberi batasan fokus berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan diatas, sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai kawasan hinterland, meliputi:
 - a. Pengenalan wilayah Buring;
 - b. Analisis Situasi.
2. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik
 - a. Strategi pembangunan wilayah Buring;
 - b. Bentuk pelayanan publik di wilayah Buring.

Lokasi penelitian Peneliti mengambil lokasi wilayah Buring sebagai daerah obyek penelitian. wilayah Buring termasuk kedalam Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Situs yang akan peneliti teliti adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PU, Kecamatan Kedungkandang, dan Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan serta alat penunjang lainnya. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data model Spradley.

Pembahasan

1. Perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai kawasan hinterland

Mengenal karakteristik dan profil wilayah merupakan langkah awal dalam melakukan pengembangan wilayah. Apabila kita mau mengembangkan suatu wilayah maka kita harus terlebih dahulu mengenali bagaimana karakteristik dan profilnya. Hal itu membantu kita untuk merencanakan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengenalan wilayah dalam tulisan ini menggunakan konsep RDA. Menurut Riyadi (2003, h.34) ntuk melakukan RDA diperlukan-nya sumber-sumber data sekunder (dokumen resmi) dan data primer (hasil kunjungan lapangan), dari gabungan antara kedua sumber data tersebut dapat dirumuskan suatu hasil RDA yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

Untuk *service centers*, menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Pasal 20 mengenai Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota sistem pusat pelayanan kegiatan Kota Malang, meliputi: Pusat pelayanan kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yakni pada Kawasan Alun-alun dan sekitarnya, dengan fungsi:

- a) Pelayanan primer: pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, saranaolahraga, dan peribadatan;
- b) Pelayanan sekunder: pendidikan, fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa, perumahan serta ruang terbuka hijau.

Sub wilayah kota Malang Tenggara, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan sebagian Kecamatan Kedungkandang, dengan fungsi:

- a) Pelayanan primer: perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat olah raga, gedung pertemuan, industri, dan perumahan;
- b) Pelayanan sekunder: perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum, serta RTH.

Untuk *Market Town* (Pusat-Pusat Pasar), di wilayah Buring, sistem perekonomian penduduknya paling banyak adalah buruh tani, swasta, dan tani. Untuk fasilitas perekonomian di wilayah Buring terdapat Pasar dan industri. Potensi yang dapat diandalkan di wilayah Buring, terutama pada sepanjang koridor Jalan Mayjend Sungkono adalah pertanian dan perdagangan. Lahan pertanian di wilayah Buring merupakan terbesar di Kota Malang. Selama tahun 2008 luas tanam dan panen tanaman padi sawah di wilayah Buring sebesar 612 hektar dengan rata-rata produksi 6,2 ton per hektar. Sedangkan untuk jagung seluas 370 dengan rata-rata produksi 3,8 ton (Kecamatan Kedungkandang, 2009). Untuk perdagangan, masyarakat di sepanjang Jalan Mayjend Sungkono banyak yang membuka usaha secara mandiri. Masyarakat sudah mampu membuka usaha rumahan. Hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat. Pekerjaan sebagai pedagang di wilayah Buring sebanyak 1715

(Kecamatan Kedungkandang, 2009), yang mana merupakan pekerjaan tertinggi keempat setelah buruh tani, swasta, dan petani.

Di bagian *Regional Centers*, wilayah Buring berdekatan dengan wilayah Gadang, Sawojajar, dan Alun-Alun Kota Malang. Sesuai dengan teori milik Myrdal (era 1950-an). Myrdal menjelaskan bahwa adanya hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya (*hinterland*) dan menggambarkan keduanya dengan istilah *backwash and spread effect*. Wilayah Buring berkedudukan sebagai wilayah *hinterland* dan wilayah Gadang, Sawojajar, dan Alun-Alun Kota Malang sebagai wilayah maju. Maju disini dalam arti pelayanan fasilitasnya (perdagangan jasa, pemerintahan, ekonomi) lebih lengkap daripada wilayah Buring.

Selain cara di atas, penulis juga menggunakan cara lain yaitu dengan identifikasi kebijakan pembangunan yang ada di wilayah Buring. Dari serangkaian kebijakan yang ada, terdapat kebijakan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan. Kebijakan yang belum berjalan diantaranya membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, hal itu menunda penyediaan jalur hijau yang nantinya akan dibangun di jalan lingkar timur tersebut. Kebijakan lain yang belum terealisasi adalah peningkatan fungsi jalan Mayjend Sungkono (pelebaran jalan dan pembangunan jembatan Kedungkandang).

Dalam penyediaan RTH pemerintah sudah menyediakan berupa hutan kota dan kebun bibit. Selain itu juga terdapat GOR Ken Arok yang menjadi taman olahraga. Untuk rencana kawasan perumahan, sudah banyak pembangunan yang dilakukan. Selain perumahan, terdapat pula rusunawa, tetapi penggunaannya belum maksimal. Untuk rencana kawasan perdagangan dan jasa berupa kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan, mulai dari toko atau warung, pertokoan, pasar, grosir, supermarket belum dilakukan.

Dalam hal membangun kawasan perkantoran berupa *Block Office* sudah dilakukan. Pembangunan tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan wilayah Buring, karena pembangunan itu menyebabkan banyaknya masyarakat dari wilayah lain yang memasuki Buring. Sedangkan untuk rencana kawasan peruntukan lainnya berupa pengembangan fasilitas umum pendidikan tinggi sudah dilakukan. Pendidikan tinggi yang terdapat di wilayah Buring adalah Universitas terbuka, dan Politeknik Kota Malang.

Setelah mengenal wilayah Buring, maka strategi kedua adalah dengan menganalisis situasi. Pada penelitian ini meliputi koridor jalan

Mayjend Sungkono, disepanjang jalan tersebut terdapat sebagian Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Arjowinangun. Wilayah itu merupakan wilayah *hinterland*. Di wilayah Buring tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota.

Untuk tahun kedepan wilayah Buring akan dijadikan wilayah dengan basis utama diperuntukkan bagi perumahan. Karena hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa pengembangan wilayah Buring lebih kepada pembangunan fisik. Menurut Tarigan (2005, h.4), perencanaan fisik sendiri merupakan tipe perencanaan pembangunan, yang berarti perencanaan yang memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah, misalnya dalam hal tata guna lahan, perencanaan jalur transportasi, dan penyediaan fasilitas umum lainnya.

2. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik

Seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan wilayah dan pelayanan publik adalah salah satu tugas penting dari pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kapasitas untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat tanpa terkecuali. Strategi pengembangan wilayah Buring, cenderung pada pendekatan kompleks wilayah (*Regional Complex Approach*). Pendekatan ini berisi mengenai pada sebaran penduduk, pola, struktur, organisasi. Sebaran penduduk di Kecamatan Kedungkandang (letak wilayah Buring) paling rendah. Hal ini disebabkan perbandingan lahan dengan jumlah penduduk.

Kecamatan Buring merupakan kecamatan terbesar di Kota Malang. Tetapi dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan luas lahan, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk yang kurang. Kecamatan Klojen yang mempunyai luas lahan sebesar 8,83 km² (luas terkecil dibandingkan kecamatan lain) dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 105,907 jiwa (BPS, 2011). Mengakibatkan Kecamatan Klojen menjadi Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal itu dikarenakan penduduk tersebar secara merata dengan kondisi luas lahan yang ada. Sehingga kebanyakan lahan terpakai dan berfungsi.

Menurut Tarigan (2010, h.93), teori lokasi model Vonthunen yang berasumsi bahwa tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat

wilayah. Wilayah Buring merupakan wilayah *hinterland* yang keberadaannya berada diperbatasan Kota Malang. Hal itu berarti tingkat kepadatan wilayah (dengan kegiatan perdagangan, jasa, pemerintahan) kurang dibandingkan di pusat kota (Malang Tengah). Hal itu juga berimbas pada tingkat sewa tanah. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa tanah maka makin besar pula kemungkinan bahwa kegiatan tersebut berada pada pusat kota. Sehingga wilayah Buring secara letak wilayah berada dipinggiran Kota Malang, yang menyebabkan tingkat kepadatan wilayah kurang dan sewa tanah menjadi murah.

Untuk pola ruang, yang dikembangkan oleh gagasan dari Ruslan Diwiryono (era 1980-an) yang melahirkan konsep pola dan struktur ruang yang menjadi inspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Pola ruang di Kota Malang terbagi atas pola ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung di wilayah Buring berada pada RTH, lahan sepanjang sungai, kawasan lindung. Wilayah Buring memiliki RTH berupa GOR Ken Arok sebagai taman olahraga, jalur hijau yaitu lahan disepanjang jalan Mayjend Sungkono, hutan kota dan kebun bibit. Kawasan lindung ini merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kawasan lindung menurut Tarigan (2012, h.60) mempunyai fungsi utama sebagai penyimpanan cadangan air, penstabilan debit air, penyedia oksigen.

Sedangkan fungsi budidaya di wilayah Buring berupa perumahan, kompleks perkantoran, dan fasilitas umum yang dibangun dilahan yang semestinya (tidak mengganggu kawasan lindung). Di wilayah Buring banyak perumahan yang dibangun, yaitu *Perumahan Griya Buring Permai*, *Rusunawa*. Selain itu juga ada kompleks perkantoran *Block Office*, kantor kelurahan atau kecamatan, unit kantor Bank BRI. Untuk fasilitas umum banyak sekolah negeri yang terdapat disana, sekolah swasta juga menjamur di wilayah Buring. Wilayah Buring juga mempunyai Rumah sakit Bersalin Refa Husada, BNN, Pusat layanan autis. Kawasan budidaya menurut Tarigan (2012, h. 61) merupakan kawasan bagi manusia agar dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau beraktifitas untuk memperoleh pendapatan/ kemakmuran.

Dalam mengembangkan wilayah terdapat campur tangan pemerintah. Hal itu termasuk dalam sinergisme fungsional (*Functional Sinergism*). Dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menangannya.

Institusi atau lembaga bertugas *me-manage* kota dan wilayah itu sendiri. Intervensi pemerintah pada wilayah Buring khususnya, berupa Pemerintah Kota Malang beserta institusi atau badan yang terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU). Kedua lembaga tersebut merupakan yang paling berpengaruh dalam menata dan merealisasikan pengembangan wilayah. BAPPEDA sebagai perancang ruang, dan Dinas PU yang merealisasikan rancangan itu, dengan mengeluarkan izin apabila ada bangunan yang akan didirikan. Hal itu tetap harus pada rancangan yang telah disusun oleh BAPPEDA.

Selain dari lembaga pemerintah, ada juga pihak swasta yang dilibatkan. Biasanya pemerintah mengeluarkan tender apabila ada proyek yang ingin dibangun. Contoh pada pengerjaan jembatan di wilayah Buring pemerintah bekerjasama dengan PT Taruna Adi Nugraha, selaku kontraktor Jembatan Kedungkandang (Malang Post, 2013). Contoh lain pada pembangunan balai uji KIR di wilayah Buring selain pemerintah juga dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi (Malang Post, 2013). Paparan diatas, menggambarkan adanya kerjasama atau penggabungan institusi (baik pihak pemerintah maupun swasta) untuk mengembangkan wilayah Buring.

Kesimpulan

Kesimpulan pertama adalah rencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sudah mengarah pada pandangan bahwa wilayah Buring nantinya akan dijadikan sebagai wilayah yang kompleksitasnya tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pembangunan di wilayah Buring dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

Meskipun banyak rencana yang sudah ditetapkan dan dijalankan, tetapi ada rencana yang kurang tepat sasaran, yaitu wilayah Buring dalam waktu 20 tahun kedepan akan dijadikan wilayah dengan fungsi utama berupa perumahan. Hal tersebut tidak cocok dengan kondisi sosial masyarakat wilayah Buring.

Kesimpulan kedua adalah mengenai upaya pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sudah baik, karena sudah melihat pada sebaran penduduk, pola, struktur, dan organisasi yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan suatu wilayah. Yang harus dibenahi adalah pada sebaran pola penduduk, karena di Kecamatan Kedungkandang belum merata

Dalam aspek lain masih terdapat kekurangan, dengan masih terlihat dengan

banyaknya infrastruktur yang akan dibangun tetapi hal itu masih belum terlaksana secara maksimal, ada yang sudah berjalan tetapi tidak dilanjutkan, bahkan ada yang masih berupa

wacana. Hal itu terjadi karena mitra kerjasama pemerintah kurang bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur terganggu.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2010. **Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dirjen Penataan Ruang–Depkimpraswil. 2003. **Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis** [internet] Availabel from <<http://www.penataanruang.net/>> (Accesed: 27 September 2013).
- Kurniawan, Agung. 2005. **Transformasi Pelayanan Publik**. Yogyakarta: Pembaruan
- Lukman, Sampara. 2000. **Manajemen Kualitas Pelayanan**. Jakarta: STIA LAN Press
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang 2009-2029**. Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Riyadi. 2003. **Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi Daerah**. PT: Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Sadyohutomo, Mulyo Nomor 2008. **Manajemen Kota dan Wilayah**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2005. **Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)**. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wiroatmojo, Iran, et al. 2001. **Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional (Bahan Ajar Diklat PIM Tingkat III)**.
- Yunus, Hadi. 2005. **Manajemen Kota Perspektif Spasial**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.